

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM BATASAN TINDAK PIDANA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Stabat Langkat)

Abdul Muisz

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tujuannya adalah untuk penyesuaian nilai uang denda yang ada dalam KUHP dengan kondisi saat ini, khususnya bagi penanganan perkara tindak pidana ringan, baik pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan serta perkara sejenisnya sehingga penanganan perkara tipiring tanpa menunggu perubahan KUHP. Penanganan tipiring sebelum adanya ini dilakukan menggunakan ketentuan Pasal 362 KUHP dan sering pelaku dijatuhi pidana lebih dari 3 bulan tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Menurut Hukum Positif.
2. Bagaimana Akibat Hukum terhadap pelaku tindak pidana ringan berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012.
3. Bagaimana Penerapan dan upaya hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan di kejaksaan negeri langkat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma hukum yaitu meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder serta melakukan penelitian langsung ke Kejaksaan Negeri Stabat Langkat. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis dalam penelitian dilakukan secara kualitatif.

Kesimpulan dalam penelitian tesis ini yaitu bahwa Hukum Terhadap tipiring Menurut Hukum Positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang batasan tindak pidana ringan. Akibat Hukum terhadap pelaku tindak pidana ringan berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 adalah dengan penyesuaian batasan kerugian, Penerapan Acara Pemeriksaan Cepat, Penyelesaian Perkara yang Lebih Cepat, Tidak Ada Penahanan serta perubahan nilai denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penerapan dan upaya hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan di kejaksaan negeri stabat langkat adalah tipiring jarang sekali ada yang sampai ke penuntutan, dan walaupun ada tetap di upayakan Restorative Justice ataupun wajib lapor ataupun denda yang disepakati dan upaya yang dilakukan dengan melaksanakan sidang cepat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi dengan Instansi terkait Restorative Justice serta pendekatan secara humanis.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Tindak Pidana, Tindak Pidana Ringan.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE LIMITATION OF CRIMINAL OFFENCES OF THE SUPREME COURT REGULATION NUMBER 2 OF 2012 ON THE LIMITATION OF MILD CRIMINALS

(Research Study at the Stabat Langkat District Attorney's Office)

Abdul Muisz

The purpose of Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 is to adjust the value of the fines in the Criminal Code to current conditions, especially for handling minor criminal cases, both minor theft, minor fraud, minor embezzlement and similar cases so that the handling of minor criminal cases without waiting for changes to the Criminal Code. The handling of minor criminal cases before this was carried out using the provisions of Article 362 of the Criminal Code and often the perpetrators were sentenced to more than 3 months without considering the sense of justice in society..

The problems in this thesis research are :

- 1. How is the Legal Regulation on Minor Criminal Offenses According to Positive Law,*
- 2. How is the Legal Consequences for perpetrators of minor criminal offenses based on Perma No. 2 of 2012,*
- 3. How is the Implementation and legal efforts in resolving minor criminal cases at the Langkat District Attorney's Office.*

The research method used is empirical legal research, namely research conducted by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials and conducting direct research at the Stabat Langkat District Attorney's Office. This research is descriptive and the analysis in the research is carried out qualitatively..

The conclusion of this thesis research is that the Legal Regulations on Minor Crimes According to Positive Law in Indonesia are regulated in the Criminal Code and Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 Concerning the Limitation of Minor Crimes. The Legal Consequences for perpetrators of minor crimes based on Perma No. 2 of 2012 are by adjusting the limits of losses, Implementation of Fast Examination Procedures, Faster Case Resolution, No Detention and changes in the value of fines in the Criminal Code. The application and legal efforts in resolving minor criminal cases at the Langkat District Attorney's Office are minor criminal cases that rarely go to prosecution, and even if there are still Restorative Justice efforts or mandatory reporting or agreed fines and efforts made by implementing fast trials, conducting socialization to the community, coordinating with related Restorative Justice Agencies and a humanistic approach.

Keywords : Legal Analysis, Criminal Acts, Minor Crimes.